

Peran Pemerintah Desa Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Rumput Laut

Imran Opi

Universitas Bina Taruna Gorontalo
imranopi537@gmail.com

Ellys Rachman

Universitas Bina Taruna Gorontalo
ellysrachman12@gmail.com

Olgha S. Nusu

Universitas Bina Taruna Gorontalo
olghanusu544@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of the village government in the development of seaweed businesses in Malambe Village, with an emphasis on coordination, facilitation, and community motivation. Although many studies discuss coastal management, previous research has tended to focus on interventions by local or central government, so that the strategic role of the village government as a local actor has received little attention. The research method employs a descriptive qualitative approach through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal that the village government acts as a program coordinator, facilitator of production facilities, and motivator in feasibility studies for the business, although its support remains limited to basic material assistance. The discussion of these findings underscores the relevance of Collaborative Governance theory in the village context, where collaboration among local actors is key to success. The novelty of this research lies in strengthening the perspective of collaborative governance at the village level, as well as highlighting the gap that the technical facilitation dimension has not been optimized in supporting the sustainability of coastal communities' seaweed businesses.

Keywords: Village Government; Seaweed; Community Participation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah desa dalam pengembangan usaha rumput laut di Desa Malambe, dengan menekankan koordinasi, fasilitasi, dan motivasi masyarakat. Meskipun banyak studi membahas pengelolaan pesisir, penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada intervensi pemerintah daerah atau pusat, sehingga peran strategis pemerintah desa sebagai aktor lokal masih kurang mendapat perhatian. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan sebagai koordinator program, fasilitator sarana produksi, serta motivator dalam studi kelayakan usaha, meskipun masih terbatas pada dukungan material sederhana. Diskusi temuan ini menegaskan relevansi teori *Collaborative Governance* dalam konteks desa, di mana kolaborasi antar-aktor lokal menjadi kunci keberhasilan. *Novelty* penelitian ini terletak pada penguatan perspektif tata kelola kolaboratif di tingkat desa, serta penegasan gap bahwa dimensi fasilitasi teknis belum optimal dalam mendukung keberlanjutan usaha rumput laut masyarakat pesisir.

Kata Kunci : Pemerintah Desa; Rumput Laut; Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Indonesia menempati posisi strategis sebagai produsen rumput laut terbesar dunia, khususnya untuk spesies *Kappaphycus* dan *Eucheuma* yang menjadi bahan baku karagenan¹. Komoditas ini tidak hanya bernilai ekonomi tinggi di sektor pangan, farmasi, dan kosmetik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam agenda ekonomi biru nasional yang berkelanjutan². Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara merata, terutama di kawasan pesisir timur Indonesia³. Regulasi nasional seperti Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Rumput Laut Nasional telah menetapkan kerangka kebijakan lintas sektor untuk pengembangan industri ini⁴, mulai dari manajemen pesisir hingga perdagangan dan investasi⁵. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut kerap terhambat oleh lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta minimnya kapasitas kelembagaan lokal⁶. Di sisi lain, kebijakan intervensionis seperti larangan ekspor rumput laut mentah di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022 membuktikan bahwa regulasi berbasis wilayah dapat mendorong nilai tambah lokal, namun sekaligus menimbulkan risiko bagi petani kecil jika tidak disertai dukungan kelembagaan yang memadai⁷.

Di tingkat komunitas, riset menunjukkan bahwa budidaya rumput laut di Indonesia didominasi oleh petani skala kecil (*smallholder*) yang memiliki kapasitas terbatas dalam mengakses modal, teknologi pascapanen, dan pasar global⁸. Keberhasilan usaha rumput laut sangat bergantung pada dukungan kelembagaan lokal: tanpa intervensi yang terstruktur dari pemerintah desa sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat industrialisasi

¹ Michael A. Rimmer dkk., "Seaweed Aquaculture in Indonesia Contributes to Social and Economic Aspects of Livelihoods and Community Wellbeing," *Sustainability* 13, no. 19 (2021): 10946, <https://doi.org/10.3390/su131910946>.

² Tabrani Null dkk., "Analysis of Seaweed Agroindustry Management in Indonesia: Potential, Challenges, and Prospects," *Science Journal of Business and Management* 12, no. 2 (2024): 27–38, <https://doi.org/10.11648/j.sjbm.20241202.11>.

³ Dwi Ratna Hidayati dkk., "Assessing Smallholders' Heterogeneity towards Sustainable Agrifood Value Chain in Developing Countries," *British Food Journal* 125, no. 12 (2023): 4307–34, <https://doi.org/10.1108/BFJ-11-2022-0940>.

⁴ Rick Kool dkk., "Spatiotemporal Aspects in Coastal Multi-Risk Climate Change Decision-Making: Wait, Protect, or Retreat?," *Ocean & Coastal Management* 258 (November 2024): 107385, <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2024.107385>.

⁵ Risti Permani dkk., "Mapping the Complex Web of Policies for Seaweed Industry Development in Indonesia: What Is the Role of a National Roadmap?," *Ocean & Coastal Management* 259 (Desember 2024): 107464, <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2024.107464>.

⁶ Ben Nagel dkk., "Mental Models of Aquaculture Governance in Indonesia," *Sustainability Science* 19, no. 6 (2024): 1825–45, <https://doi.org/10.1007/s11625-024-01545-y>.

⁷ Alexandra Langford dkk., "Interventionist Industry Policy to Support Local Value-Adding: Evidence from the Eastern Indonesian Seaweed Industry," *Marine Policy* 151 (Mei 2023): 105561, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105561>.

⁸ Rimmer dkk., "Seaweed Aquaculture in Indonesia Contributes to Social and Economic Aspects of Livelihoods and Community Wellbeing."

rumput laut hanya akan menguntungkan pelaku besar dan meninggalkan petani kecil dalam kerentanan struktural⁹. Penelitian tentang tata kelola perikanan partisipatif di Indonesia juga menegaskan bahwa model *co-management* yang melibatkan komunitas secara aktif terbukti lebih efektif dibanding pendekatan top-down dalam merespons kebutuhan lokal¹⁰.

Kondisi ini sangat relevan di Desa Malambe, Kabupaten Gorontalo Utara, yang memiliki garis pantai sepanjang 356 kilometer dan telah dikenal sebagai sentra rumput laut sejak awal 1990-an¹¹. Fakta bahwa jumlah petani aktif merosot drastis dari 49 orang (2023) menjadi hanya 3 orang (2025)¹² mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata kelola dan dukungan kelembagaan desa¹³. Infrastruktur panen dan penyimpanan yang tidak memadai, ketiadaan pelatihan pascapanen, serta minimnya akses pembiayaan menjadi hambatan struktural yang berulang permasalahan yang juga ditemukan di kawasan pesisir lain di timur Indonesia¹⁴. Studi-studi terdahulu umumnya berfokus pada aspek teknis budidaya, analisis rantai nilai komoditas, atau kebijakan pemerintah pusat¹⁵ sementara kajian tentang peran struktural dan fungsional pemerintah desa dalam mendorong pengembangan usaha rumput laut khususnya di kawasan pesisir timur Indonesia masih sangat terbatas. Kesenjangan riset ini menjadi signifikan

⁹ Nathan J. Bennett dkk., "Social Sustainability and Equity in the Blue Economy," *One Earth* 5, no. 9 (2022): 964–68, <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.08.004>.

¹⁰ Rayhan Dudayev dkk., "Participatory Fisheries Governance in Indonesia: Are Octopus Fisheries Leading the Way?," *Marine Policy* 147 (Januari 2023): 105338, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105338>.

¹¹ Tabrani dkk., "Analysis of Seaweed Agroindustry Management in Indonesia: Potential, Challenges, and Prospects," *Science Journal of Business and Management* 12, no. 2 (2024): 27–38, <https://doi.org/10.11648/j.sjbm.20241202.11>.

¹² Purna dewinta Soga dkk., "Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional Di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara," *Economics and Digital Business Review* 5, no. 2 (2024): 432–41, <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1830>.

¹³ Pratiwi Harun, "Identifikasi Jenis Dan Pemanfaatan Teripang Di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara," *Skripsi* 1, no. 1131415009 (2021), <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/1131415009/identifikasi-jenis-dan-pemanfaatan-teripang-di-desa-malambe-kecamatan-ponelo-kepulauan-kabupaten-gorontalo-utara.html>.

¹⁴ Hidayati dkk., "Assessing Smallholders' Heterogeneity towards Sustainable Agrifood Value Chain in Developing Countries."

¹⁵ Langford dkk., "Interventionist Industry Policy to Support Local Value-Adding."

mengingat desentralisasi fiskal dan otonomi desa¹⁶ di Indonesia seharusnya menempatkan desa¹⁷ sebagai motor utama pembangunan berbasis komunitas^{18;19}

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara mendalam bagaimana pemerintah Desa Malambe merespons tantangan pengembangan usaha rumput laut baik melalui kebijakan, program, maupun praktik sosial-ekonomi. Tujuannya bukan sekadar deskriptif, melainkan juga analitis-kritis: mengidentifikasi bentuk konkrit peran pemerintah desa sebagai fasilitator, motivator, dan katalisator pembangunan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan lokal yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama lima bulan, dimulai pada bulan Januari hingga Mei 2025, di Desa Malambe, Kecamatan Ponelo Kepulauan, Kabupaten Gorontalo Utara. Lokasi ini dipilih secara *purposive* berdasarkan identifikasi awal rendahnya keterlibatan struktural pemerintah desa dalam pengembangan usaha rumput laut, yang telah berdampak pada penurunan signifikan jumlah pembudidaya dalam tiga tahun terakhir. Pemilihan lokasi juga mempertimbangkan karakteristik sosial-ekonomi desa yang mayoritas penduduknya merupakan nelayan dan petani rumput laut²⁰. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan paradigma konstruktivistik untuk memahami secara mendalam peran pemerintah desa dalam mendukung pengembangan usaha rumput laut. Pendekatan ini dipilih agar mampu menggali makna sosial dari perspektif pelaku, serta memahami hubungan dinamis antara kebijakan desa dan praktik budidaya masyarakat secara kontekstual²¹.

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah enam orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria inklusi tertentu, yaitu: (1) merupakan aktor kunci

¹⁶ Muhammad Syukri, "Neglecting the Poor and Marginalized: Participatory Village Governance in Indonesia's New Developmentalist State," *Development Policy Review* 42, no. 4 (2024): e12776, <https://doi.org/10.1111/dpr.12776>.

¹⁷ Muhammad Syukri, "Gender Policies of the New Developmental State: The Case of Indonesian New Participatory Village Governance," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 42, no. 1 (2023): 110–33, <https://doi.org/10.1177/18681034221149750>.

¹⁸ Muhammad Syukri, "Indonesia's New Developmental State: Interrogating Participatory Village Governance," *Journal of Contemporary Asia* 54, no. 1 (2024): 2–23, <https://doi.org/10.1080/00472336.2022.2089904>.

¹⁹ Jasmin Anizah Latief dan Nurrohman Wijaya, "Exploring the Role of Local Government in Empowering Small-Scale Fishing Communities in Northern Coastal Jakarta, Indonesia," *Maritime Studies* 24, no. 3 (2025): 49, <https://doi.org/10.1007/s40152-025-00442-z>.

²⁰ Muhibul Haq dan Naveed Yasin, "Qualitative, Quantitative, and Mixed Methodology Paradigms," *Journal of Practical Studies in Education* 6, no. 6 (2025): 15–29, <https://doi.org/10.46809/jpse.v6i6.144>.

²¹ Dr Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, 2013.

dalam pengelolaan atau kebijakan desa terkait perikanan (Kepala Desa dan perangkat desa), (2) aktif sebagai pembudidaya rumput laut minimal dua tahun terakhir, dan (3) bersedia diwawancarai secara mendalam. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup individu yang tidak bersedia berpartisipasi secara aktif atau telah berhenti total dari aktivitas budidaya selama lebih dari satu tahun terakhir²². Informan terdiri dari satu kepala desa, dua perangkat desa bagian pembangunan dan pemberdayaan, serta tiga petani rumput laut yang aktif menjalankan usahanya.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi metode, yaitu: (1) wawancara mendalam semi-terstruktur, (2) observasi partisipatif terhadap praktik budidaya dan interaksi antara petani dan pemerintah desa, serta (3) dokumentasi berupa berita acara musyawarah desa, proposal kegiatan, laporan keuangan desa, dan foto-foto lapangan. Data sekunder diperoleh dari laporan dinas perikanan, dokumen regulasi desa, serta publikasi ilmiah terkait pengembangan usaha pesisir²³. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman²⁴ yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan mengklasifikasikan dan menyaring data yang relevan berdasarkan tema fokus: koordinasi program, fasilitasi, dan motivasi usaha. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan dengan member checking, yaitu mengonfirmasi kembali informasi inti kepada informan untuk memastikan akurasi narasi dan interpretasi peneliti. Keabsahan (*trustworthiness*) data dijaga melalui empat strategi utama. Pertama, *credibility* diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, serta *member checking*. Kedua, *transferability* dijaga dengan mendeskripsikan konteks sosial dan ekonomi desa secara rinci agar hasil dapat dipertimbangkan untuk situasi serupa di daerah lain. Ketiga, *dependability* dicapai dengan pencatatan *audit trail* yang sistematis terhadap setiap proses analisis, termasuk memo lapangan, catatan wawancara, dan proses pengambilan keputusan analitis. Keempat, *confirmability* dijamin melalui dokumentasi analisis yang transparan, pelibatan *peer debriefing*, serta keterbukaan terhadap kritik dan verifikasi dari pembimbing atau mitra akademik.

²² John W. Creswell dan Timothy C. Guetterman, *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*, Seventh edition (Pearson Education, 2025).

²³ Burke Johnson dan Larry B. Christensen, *Educational research: quantitative, qualitative, and mixed approaches*, Seventh edition (SAGE, 2020).

²⁴ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (sage, 1994).

RESULTS AND DISCUSSION

Koordinasi Program Usaha

Koordinasi Program Usaha adalah proses sinergi antara pemerintah daerah (atau lembaga terkait) dengan dunia usaha dalam pengelolaan program-program seperti Corporate Social Responsibility (CSR) atau kegiatan lain yang melibatkan kerjasama. Hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dengan R.B selaku kepala desa Malambe mengemukakan:

“....., Program Usaha Rumput Laut Di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara itu sangat penting, sebab pada tahun 2023 kami pemerintah desa Malambe membantu masyarakat petani rumput laut dengan menggunakan dana desa untuk kita belanja bahan utama untuk pengelolaan rumput laut berupa tali untuk mereka pakai”. (R.B Wawancara, 8 Mei 2025)

Apa yang di kemukakan R.B sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh H.J selaku Sekretaris Desa:

“..., untuk usaha rumput laut itu sudah ada pada tahun 2020 sampai dengan saat ini, pada tahun 2023 pemerintah desa melakukan pengadaan bahan untuk masyarakat yang memiliki usaha rumput laut berupa tali untuk mereka gunakan saat melakukan pengelolaan rumput laut. Kami pemerintah desa juga masih mengusahakan pemberian bantuan bibit kepada masyarakat kami menunggu anggaran selanjutnya dari pemerintah daerah”. (H.J Wawancara, 8 Mei 2025)

Apa yang dikemukakan oleh kedua informan di atas sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Warga Y.A

“kami sebagai masyarakat yang berkerja sebagai pengelola rumput laut kami sering berkordinasi dengan pihak pemerintah desa dalam hal ini kami sering melakukan koordinasi mengenai program usaha kami untuk dikembangkan lebih lanjut, koordinasi ini kami lakukan agar kami masyarakat paham akan kegunaan rumput laut untuk mengembangkan program usaha ini”. (Y.A Wawancara, 9 Mei 2025)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Malambe, Sekretaris Desa, dan warga pengelola rumput laut, terlihat bahwa koordinasi program usaha rumput laut di desa ini berjalan dengan dukungan nyata dari pemerintah desa melalui pemanfaatan dana desa.

Olehya, dapat di simpulkan bahwa koordinasi program usaha rumput laut di Desa Malambe menunjukkan peran aktif pemerintah desa dalam memberikan dukungan materi dan komunikasi yang berkelanjutan dengan masyarakat pengelola. Sinergi ini menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan program usaha yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan adanya koordinasi yang baik, program usaha rumput laut dapat dikembangkan lebih efektif dan tepat sasaran.

Fasilitator

Fasilitator dalam budidaya rumput laut adalah orang yang berperan penting dalam membantu petani rumput laut dalam berbagai aspek budidaya, mulai dari persiapan lahan hingga pasca panen. Mereka membantu petani untuk memahami teknik budidaya yang baik, mengatasi masalah yang dihadapi, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil budidaya rumput laut. Hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dengan R.B selaku kepala desa Malambe mengemukakan:

“...., Peran pemerintah desa dalam hal ini, kami sering turun secara langsung dan melihat proses pengelolaan rumput laut. Kami pemerintah desa melihat masyarakat pengelola rumput laut dari proses pemilihan bibit untuk mereka pakai pada saat mereka gunakan. Untuk fasilitator disini kami pemerintah desa hanya memberikan bantuan berupa tali untuk mereka gunakan pada saat mengikat rumput laut tersebut”. (R.B Wawancara, 8 Mei 2025)

Apa yang di kemukakan R.B sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh H.J selaku Sekertaris Desa:

“...., Untuk fasilitas pada pengelolaan rumput laut kami pemerintah desa hanya menunggu bantuan dari pemerintah kabupaten untuk di berikan kepada mereka yang memiliki usaha rumput laut tersebut. Jadi untuk kami pemerintah untuk memberikan fasilitas secara seknifikan itu tidak ada, karena pelaku usaha rumput laut itu hanya bersifat individu” (H.J Wawancara, 8 Mei 2025)

Apa yang dikemukakan oleh kedua informan di atas sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh aparat desa E.S

“....., Untuk fasilitator menurut saya sebagai kepala dusun itu masih kurang karena belum ada seseorang ditunjuk untuk memberikan petunjuk bagaimana cara-cara mengelola rumput laut secara baik. Jadi untuk kami pemerintah desa masih merasa kurang dengan fasilitas yang kami berikan kepada mereka yang mengelola rumput laut tersebut. Tetapi kami pemerintah hanya berikan fasilitas berupa tali yang digunakan saat mengikat rumput laut”. (E.S Wawancara, 8 Mei 2025)

Apa yang dikemukakan oleh ketiga informan di atas sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh warga N.O

“....., Untuk fasilitas yang kami terima sebagai pengelola rumput laut kami hanya merima tali yang berikan oleh pemerintah desa, akan tetapi kami juga sangat bersyukur dengan bantuan yang apa diberikan oleh Pemerintah Desa buat kami masyarakat yang memiliki usaha rumput laut ini. Kami tidak pernah menuntut untuk diberikan fasilitas yang terbaik kami hanya bisa menerima apa yang mereka berikan”. (N.O Wawancara, 9 Mei 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparat dusun, dan warga pengelola rumput laut, peran fasilitator dalam budidaya rumput laut di Desa Malambe masih sangat terbatas. Pemerintah desa hanya mampu memberikan dukungan berupa bantuan tali untuk pengelolaan rumput laut, sedangkan fasilitas dan pendampingan teknis secara

langsung masih kurang dan belum ada petugas khusus yang ditunjuk sebagai fasilitator. Bantuan yang diharapkan seperti alat atau pelatihan lebih lanjut masih bergantung pada bantuan dari pemerintah kabupaten. Meski demikian, masyarakat pengelola rumput laut tetap mengapresiasi bantuan tali yang diberikan, walaupun mereka menyadari fasilitas tersebut belum optimal dan tidak menuntut lebih dari apa yang diterima.

Motivasi Kelayakan Usaha

Motivasi dalam konteks kelayakan usaha (atau studi kelayakan bisnis) merujuk pada dorongan atau alasan yang kuat yang mendorong seseorang untuk melakukan analisis kelayakan terhadap suatu ide atau rencana bisnis. Motivasi ini bisa beragam, mulai dari keinginan untuk meraih profit, mengurangi risiko, hingga membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dengan R.B selaku kepala desa Malambe mengemukakan:

“...., Untuk motivasi kelayakan usaha itu sudah ada sejak awal tetapi yang dinamakan untuk motivasi itu pasti ada penopang bantuan dari pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi untuk mereka jadikan usaha bersama, tetapi saat ini untuk motivasi kelayakan usaha Kami pemerintah desa selalu melakukan motivasi kepada mereka pengelola usaha rumput laut untuk lebih meningkatkan usaha mereka agar semua orang tahu usaha rumput laut ini berjalan sesuai apa yang masyarakat inginkan”. (R.B Wawancara, 8 Mei 2025)

Apa yang di kemukakan R.B sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh H.J selaku Sekertaris Desa:

“....., Untuk motivasi kelayakan usaha itu dikembalikan kepada masing-masing masyarakat untuk mereka kembangkan secara bersama-sama. Ada juga kelompok usaha yang putus asa dalam usaha pengembangan usaha rumput laut, itu tergantung dari masyarakat untuk berkelompok atau tidak”. (H. J Wawancara, 8 Mei 2025)

Apa yang dikemukakan oleh kedua informan di atas sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh aparat desa E.S

“....., Untuk motivasi kelayakan usaha dalam mendukung pengembangan usaha rumput laut Di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan itu sudah memberikan motivasi kepada mereka yang sebagian yang memiliki usaha rumput laut, untuk itu kami pemerintah desa selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan usaha mereka ke tingkat provinsi agar mereka lebih mengembangkan usaha rumput laut mereka”. (ES Wawancara, 8 Mei 2025)

Apa yang dikemukakan oleh ketiga informan di atas sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh warga O.I

“Kami sebagai masyarakat berterima kasih kepada pemerintah desa yang selalu meberikan motivasi kepada kami pelaku usah rumput laut. Kami masyarakat selalu memberikan yang terbaik untuk pemerintah desa dalam usaha yang kami jalankan saat ini ”. (O. I Wawancara, 10 Mei 2025)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, aparat dusun, dan warga Desa Malambe, tampak bahwa motivasi dalam kelayakan usaha budidaya rumput laut telah menjadi bagian dari perhatian pemerintah desa. Pemerintah desa secara aktif memberikan dorongan dan semangat kepada para pelaku usaha agar tetap konsisten dan terus mengembangkan kegiatan budidaya rumput laut. Namun, motivasi ini tidak hanya bersifat internal dari masyarakat, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan dukungan eksternal seperti bantuan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Sebagian warga dan kelompok usaha bahkan mengalami penurunan semangat karena keterbatasan dukungan, namun secara umum, masyarakat tetap mengapresiasi motivasi yang diberikan oleh pemerintah desa dan merasa termotivasi untuk meningkatkan skala dan kualitas usaha mereka.

Analisis Data Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang di atas maka peneliti mencoba melakukan analisis data secara tematik yang akan di sajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Analisis Data

Fokus	Data (Wawancara)	Reduksi Data	Display Data	Kesimpulan/Verifikasi
Koordinasi Program Usaha	• Kepala Desa: dana desa untuk beli tali; • Sekretaris Desa: bantuan sejak 2020, bibit menunggu kabupaten; • Warga: koordinasi dengan desa penting	• Dukungan pemerintah desa berupa bantuan material; • koordinasi berjalan sejak 2020; • komunikasi aktif desa–masyarakat	• Pola koordinasi: Desa masyarakat; komunikasi dua arah; • ketergantungan pada kabupaten untuk tambahan bantuan	Koordinasi berjalan cukup efektif, ditandai dukungan material & komunikasi. Namun, masih tergantung anggaran pemerintah daerah.
Fasilitator	• Kepala Desa: hanya memberi tali (barang); • Sekretaris Desa: menunggu kabupaten; • Aparat Dusun: belum ada fasilitator khusus; • Warga: syukur walau hanya dapat tali	• Fasilitasi masih material, belum teknis; • ketiadaan fasilitator khusus; • masyarakat menerima dengan keterbatasan	• Fasilitasi terbatas tali; • ketergantungan pada level kabupaten; • gap dalam pendampingan teknis	Peran fasilitator belum optimal, lebih bersifat administratif daripada pendampingan teknis. Masyarakat apresiatif tapi menyadari keterbatasan.
Motivasi Kelayakan Usaha	• Kepala Desa: motivasi perlu bantuan kabupaten/provinsi; • Sekretaris Desa: motivasi	• Motivasi dipengaruhi faktor eksternal (dukungan pemerintah) dan internal	• Motivasi kombinasi eksternal dan internal; • sebagian warga putus asa;	Motivasi masyarakat relatif terjaga, tapi keberlanjutan sangat dipengaruhi bantuan eksternal. Ada potensi

dikembalikan ke masyarakat;	(inisiatif masyarakat);	• ada aspirasi naik skala usaha	ekspansi jika dukungan konsisten.
• Aparat Dusun: dorongan untuk skala provinsi;	• variasi motivasi antar warga		
• Warga: berterima kasih pada dukungan desa			

Sumber: Peneliti, 2025

Hasil analisis data menunjukkan bahwa koordinasi program usaha rumput laut di Desa Malambe sudah berjalan cukup baik. Pemerintah desa berperan aktif memberikan dukungan berupa bantuan material seperti tali, serta menjaga komunikasi dengan masyarakat. Meski demikian, ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah kabupaten masih tinggi.

Pada aspek fasilitator, peran yang dijalankan masih terbatas. Pemerintah desa hanya mampu memberikan bantuan sederhana tanpa pendampingan teknis, dan belum ada fasilitator khusus yang ditugaskan. Kondisi ini membuat peningkatan kapasitas masyarakat dalam budidaya rumput laut masih kurang optimal, walaupun masyarakat tetap bersyukur atas bantuan yang diterima. Sementara itu, motivasi kelayakan usaha terlihat cukup terjaga berkat dorongan moral pemerintah desa, namun keberlanjutannya sangat dipengaruhi oleh dukungan eksternal. Sebagian masyarakat tetap bersemangat, tetapi ada pula yang mulai kehilangan motivasi karena keterbatasan fasilitas dan bantuan. Secara umum, motivasi internal masyarakat perlu diperkuat dengan dukungan eksternal yang lebih konsisten.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan usaha rumput laut di Desa Malambe ditentukan oleh sinergi tiga faktor utama: koordinasi yang baik, fasilitator yang memadai, serta motivasi masyarakat yang didukung oleh kebijakan dan bantuan dari pemerintah di tingkat lebih tinggi.

Pembahasan

Koordinasi Program Usaha

Koordinasi merupakan fondasi dalam pengelolaan program pembangunan desa. Di Desa Malambe, pemerintah desa menjalankan fungsi koordinatif dengan mengintegrasikan kepentingan masyarakat dan sumber daya lokal dalam pengembangan usaha rumput laut. Melalui penggunaan dana desa, perangkat desa menyediakan kebutuhan dasar seperti tali budidaya, yang kemudian didistribusikan secara langsung kepada petani. Langkah ini menunjukkan bentuk nyata sinergi antara kebijakan desa dan kebutuhan warga. Fenomena ini

dapat dijelaskan melalui perspektif *Collaborative Governance*²⁵, yang menekankan pentingnya interaksi, kepercayaan, dan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan publik²⁶. Sejalan dengan temuan penelitian di wilayah pesisir Sulawesi Selatan, keberhasilan usaha perikanan dan rumput laut sangat bergantung pada intensitas komunikasi dan kerjasama antar-aktor lokal²⁷. Olehnya, koordinasi yang berjalan di Desa Malambe mencerminkan praktik kolaboratif yang menghindari tumpang tindih program sekaligus memperkuat efektivitas pembangunan desa berbasis potensi kelautan.

Peran Fasilitator

Dalam kerangka *Collaborative Governance*, pemerintah desa tidak hanya bertindak sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan masyarakat. Fasilitasi di Desa Malambe masih terbatas pada pemberian dukungan material sederhana, tanpa pendampingan teknis yang intensif. Ketiadaan fasilitator khusus menyebabkan proses transfer pengetahuan budidaya rumput laut belum berjalan maksimal. Kondisi ini senada dengan studi yang menyoroti peran pemerintah desa sebagai mediator dalam pembangunan ekonomi masyarakat pesisir. Fasilitasi yang kuat tidak hanya berupa penyediaan sarana²⁸, tetapi juga pendampingan dalam bentuk pelatihan, akses pasar, dan pembinaan teknis²⁹. Minimnya fasilitator teknis di Desa Malambe mengindikasikan adanya ruang perbaikan dalam memperkuat kapasitas lokal, sehingga kolaborasi tidak berhenti pada distribusi material semata, tetapi berlanjut pada pengembangan kompetensi masyarakat.

Motivasi Kelayakan Usaha

Motivasi dalam kelayakan usaha rumput laut di Desa Malambe juga dapat dipahami melalui kerangka *Collaborative Governance*. Pemerintah desa berperan sebagai pemberi stimulus moral dan penggerak partisipasi masyarakat dalam usaha produktif. Dukungan berupa dorongan untuk tetap konsisten dan keyakinan bahwa usaha rumput laut dapat berkembang menjadi modal penting dalam menjaga semangat warga. Namun demikian, motivasi masyarakat masih

²⁵ Chris Ansell, *Collaborative Governance* (Oxford University Press, 2012), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560530.013.0035>.

²⁶ Christopher Ansell dkk., "Understanding Inclusion in Collaborative Governance: A Mixed Methods Approach," *Policy and Society* 39, no. 4 (2020): 570–91, <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1785726>.

²⁷ Agnes Sunartiningih dan Zita Wahyu Larasati, "Inisiatif dari pesisir utara Jawa: Merangkul kearifan lokal dan kerjasama antar aktor berkepentingan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir," *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial* 5, no. 1 (2020): 28–39.

²⁸ Tabrani dkk., "Analysis of Seaweed Agroindustry Management in Indonesia."

²⁹ Wilda Fatmala dkk., "Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Budidaya Rumput Laut sebagai Sumber Pendapatan Masyarakat," *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship* 12, no. 2 (2023): 471, <https://doi.org/10.30588/jmp.v12i2.1099>.

sangat dipengaruhi oleh dukungan eksternal seperti bantuan dari pemerintah kabupaten dan provinsi. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat pesisir mampu meningkatkan motivasi berusaha melalui penciptaan rasa memiliki dan dukungan kebijakan yang berpihak³⁰. Motivasi yang terjaga berkat kolaborasi lintas aktor tidak hanya meningkatkan keberanian masyarakat dalam berusaha, tetapi juga memperkuat legitimasi usaha mereka di mata pihak eksternal seperti lembaga keuangan dan calon investor.

CONCLUSION

Pertama, Refleksi Teoritis dan Implikasi Praktis: Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori *Collaborative Governance* relevan dalam menjelaskan peran pemerintah desa sebagai koordinator, fasilitator, dan motivator dalam pengembangan usaha rumput laut di Desa Malambe. Dari sisi praktis, kolaborasi yang terbangun telah menciptakan sinergi awal antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendorong keberlanjutan usaha. Implikasi praktisnya adalah perlunya penguatan kapasitas desa sebagai pusat koordinasi, penyedia fasilitasi teknis, dan penggerak motivasi, agar usaha rumput laut tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.

Kedua, Keterbatasan Studi: Penelitian ini masih terbatas pada lingkup Desa Malambe, sehingga hasil temuan belum dapat digeneralisasi untuk seluruh desa pesisir dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda. Selain itu, data yang digunakan lebih banyak bersumber pada wawancara dan observasi lapangan, sehingga perspektif dari aktor eksternal seperti pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pihak swasta masih belum sepenuhnya tergali.

Ketiga, Agenda Penelitian Lanjutan: Studi berikutnya dapat diarahkan pada analisis komparatif antara beberapa desa pesisir untuk melihat variasi praktik *Collaborative Governance* dalam sektor rumput laut. Penelitian lanjutan juga perlu memperluas fokus pada keterlibatan aktor non-pemerintah, seperti koperasi nelayan, lembaga keuangan mikro, dan sektor swasta, agar diperoleh gambaran lebih utuh mengenai jejaring kolaborasi. Selain itu, pendekatan kuantitatif dengan mengukur dampak ekonomi dari intervensi pemerintah desa terhadap kesejahteraan masyarakat juga dapat memperkuat hasil penelitian ini.

³⁰ Shashi Motilal dkk., "Care, Community, Compassion and Virtue: Decolonizing Our Moral Landscape," dalam *The Ethics of Governance: Moral Limits of Policy Decisions*, ed. oleh Shashi Motilal dkk. (Springer, 2021), https://doi.org/10.1007/978-981-16-4043-8_7.

REFERENSI

- Ansell, Chris. *Collaborative Governance*. Oxford University Press, 2012. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560530.013.0035>.
- Ansell, Christopher, Carey Doberstein, Hayley Henderson, Saba Siddiki, dan Paul ‘T Hart. “Understanding Inclusion in Collaborative Governance: A Mixed Methods Approach.” *Policy and Society* 39, no. 4 (2020): 570–91. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1785726>.
- Bennett, Nathan J., Sebastián Villasante, María José Espinosa-Romero, Priscila F. M. Lopes, Samiya A. Selim, dan Edward H. Allison. “Social Sustainability and Equity in the Blue Economy.” *One Earth* 5, no. 9 (2022): 964–68. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2022.08.004>.
- Creswell, John W., dan Timothy C. Guetterman. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Seventh edition. Pearson Education, 2025.
- Dudayev, Rayhan, Lugas Lukmanul Hakim, dan Indah Rufiati. “Participatory Fisheries Governance in Indonesia: Are Octopus Fisheries Leading the Way?” *Marine Policy* 147 (Januari 2023): 105338. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105338>.
- Fatmala, Wilda, Murni Sari, Yunarsi Yunarsi, dan Novitasari Rahman. “Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Budidaya Rumput Laut sebagai Sumber Pendapatan Masyarakat.” *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship* 12, no. 2 (2023): 471. <https://doi.org/10.30588/jmp.v12i2.1099>.
- Haq, Muhibul, dan Naveed Yasin. “Qualitative, Quantitative, and Mixed Methodology Paradigms.” *Journal of Practical Studies in Education* 6, no. 6 (2025): 15–29. <https://doi.org/10.46809/jpse.v6i6.144>.
- Harun, Pratiwi. “Identifikasi Jenis Dan Pemanfaatan Teripang Di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara.” *Skripsi* 1, no. 1131415009 (2021). <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/1131415009/identifikasi-jenis-dan-pemanfaatan-teripang-di-desa-malambe-kecamatan-ponelo-kepulauan-kabupaten-gorontalo-utara.html>.
- Hidayati, Dwi Ratna, Elena Garnevska, dan Thiagarajah Ramilan. “Assessing Smallholders’ Heterogeneity towards Sustainable Agrifood Value Chain in Developing Countries.” *British Food Journal* 125, no. 12 (2023): 4307–34. <https://doi.org/10.1108/BJFJ-11-2022-0940>.
- Johnson, Burke, dan Larry B. Christensen. *Educational research: quantitative, qualitative, and mixed approaches*. Seventh edition. SAGE, 2020.
- Kool, Rick, Judy Lawrence, Morten Andreas Dahl Larsen, Alistair Osborne, dan Martin Drews. “Spatiotemporal Aspects in Coastal Multi-Risk Climate Change Decision-Making: Wait, Protect, or Retreat?” *Ocean & Coastal Management* 258 (November 2024): 107385. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2024.107385>.
- Langford, Alexandra, Welem Turupadang, dan Scott Waldron. “Interventionist Industry Policy to Support Local Value-Adding: Evidence from the Eastern Indonesian Seaweed Industry.” *Marine Policy* 151 (Mei 2023): 105561. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105561>.
- Latief, Jasmin Anizah, dan Nurrohman Wijaya. “Exploring the Role of Local Government in Empowering Small-Scale Fishing Communities in Northern Coastal Jakarta, Indonesia.” *Maritime Studies* 24, no. 3 (2025): 49. <https://doi.org/10.1007/s40152-025-00442-z>.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage, 1994.

- Motilal, Shashi, Keya Maitra, dan Prakriti Prajapati. "Care, Community, Compassion and Virtue: Decolonizing Our Moral Landscape." Dalam *The Ethics of Governance: Moral Limits of Policy Decisions*, disunting oleh Shashi Motilal, Keya Maitra, dan Prakriti Prajapati. Springer, 2021. https://doi.org/10.1007/978-981-16-4043-8_7.
- Nagel, Ben, Eva Anggraini, Nurliah Buhari, Steven Gray, Stefan Partelow, dan Achim Schlüter. "Mental Models of Aquaculture Governance in Indonesia." *Sustainability Science* 19, no. 6 (2024): 1825–45. <https://doi.org/10.1007/s11625-024-01545-y>.
- Null, Tabrani, Wisman Angkasa, dan Ika Deviarni. "Analysis of Seaweed Agroindustry Management in Indonesia: Potential, Challenges, and Prospects." *Science Journal of Business and Management* 12, no. 2 (2024): 27–38. <https://doi.org/10.11648/j.sjbm.20241202.11>.
- Permani, Risti, Yanti N. Muflikh, dan Fikri Sjahruddin. "Mapping the Complex Web of Policies for Seaweed Industry Development in Indonesia: What Is the Role of a National Roadmap?" *Ocean & Coastal Management* 259 (Desember 2024): 107464. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2024.107464>.
- Rimmer, Michael A., Silva Larson, Imran Lapong, dkk. "Seaweed Aquaculture in Indonesia Contributes to Social and Economic Aspects of Livelihoods and Community Wellbeing." *Sustainability* 13, no. 19 (2021): 10946. <https://doi.org/10.3390/su131910946>.
- Soga, Purna dewinta, Ria Indriani, dan Echan Adam. "Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional Di Desa Malambe Kecamatan Ponelo Kepulauan Kabupaten Gorontalo Utara." *Economics and Digital Business Review* 5, no. 2 (2024): 432–41. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1830>.
- Sugiyono, Dr. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. 2013.
- Sunartiningih, Agnes, dan Zita Wahyu Larasati. "Inisiatif dari pesisir utara Jawa: Merangkul kearifan lokal dan kerjasama antar aktor berkepentingan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir." *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial* 5, no. 1 (2020): 28–39.
- Syukri, Muhammad. "Gender Policies of the New Developmental State: The Case of Indonesian New Participatory Village Governance." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 42, no. 1 (2023): 110–33. <https://doi.org/10.1177/18681034221149750>.
- Syukri, Muhammad. "Indonesia's New Developmental State: Interrogating Participatory Village Governance." *Journal of Contemporary Asia* 54, no. 1 (2024): 2–23. <https://doi.org/10.1080/00472336.2022.2089904>.
- Syukri, Muhammad. "Neglecting the Poor and Marginalized: Participatory Village Governance in Indonesia's New Developmentalist State." *Development Policy Review* 42, no. 4 (2024): e12776. <https://doi.org/10.1111/dpr.12776>.
- Tabrani, Wisman Indra Angkasa, dan Ika Meidy Deviarni. "Analysis of Seaweed Agroindustry Management in Indonesia: Potential, Challenges, and Prospects." *Science Journal of Business and Management* 12, no. 2 (2024): 27–38. <https://doi.org/10.11648/j.sjbm.20241202.11>.